
**PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT PASCA PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) KOTO PANJANG
PROVINSI RIAU**

Syapsan, Syafril Basri, dan Elida Ilyas

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

PENDAHULUAN

Gerak pembangunan dalam kewilayahan mengalami proses yang panjang dengan melibatkan semua komponen kehidupan, baik sosial-ekonomi dan budaya. Perubahan yang terjadi adakalanya membawa kepada situasi perbenturan kepentingan dalam masyarakat, baik secara langsung dalam aspek sosial-ekonomi dan budaya. Meminimalisir dampak yang terjadi baik secara sosial-ekonomi dan budaya, perlu langkah preventif yang menguntungkan dan solusi persoalan dapat memberikan alternatif pemecahan kepada seluruh aspek kehidupan.

Kegiatan pembangunan akan menyebabkan terjadinya apa yang disebut perubahan sosial (*social change*). Konsep ini seolah-olah berada dalam lingkup “sosial” saja, padahal input maupun stimulusnya seringkali lebih karena adanya pembangunan (proyek) fisik tertentu. Contoh sederhana, dengan dibangunnya sebuah waduk akan menyebabkan – secara cepat dan pasti lahan atau kebun masyarakat di sekitar yang terkena proyek pembangunan akan terhenti. Padahal dengan lahan atau kebun tersebutlah anggota-anggota masyarakat secara turun temurun membiayai kehidupan dan kebutuhan lainnya. Bila kondisi ini berlanjut, secara sosial akan menyebabkan terjadinya perubahan pola mata pencaharian dan inilah yang disebut sebagai contoh perubahan sosial.

PERUBAHAN SOSIAL

Ada beberapa pengertian perubahan sosial yaitu sebagai berikut :

1. Max Weber berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur (dalam buku *Sociological Writings*).
2. W. Kornblum berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama (dalam buku *Sociology in Changing World*).

Dengan memahami definisi perubahan sosial dan budaya di atas, maka suatu perubahan dikatakan sebagai perubahan sosial budaya apabila memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat ataupun lambat.
2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada.
3. Perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara karena orang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi.
4. Perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena keduanya saling berkaitan.

Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial-budaya antara lain dikarenakan adanya perubahan demografi (*demographic change*), pergerakan dan perubahan sosial (*social movement and change*), serta adanya penemuan-penemuan. Penemuan itu sendiri meliputi persebaran kebudayaan (*diffusion*), inovasi dan evolusi kebudayaan (Koentjaraningrat, 1986).

Persiapan sebuah proyek, secara sosiologis maupun antropologis, harus memperhatikan dan memprediksi (secara seksama) terjadinya perubahan sosial. Bagaimanapun kadar dan bentuknya, bila dimunculkan suatu stimulus seperti pembangunan fisik tersebut tentunya akan memunculkan perubahan sosial dengan nuansa dan kadar yang berbeda.

Ada 4 karakter perubahan sosial:

1. *Social change happens everywhere; however, the rate of change varies from place to place* – jadi perubahan sosial pun bervariasi, dan pada gilirannya perlu tanggapan dan perilaku penanganan yang berbeda-beda;
2. *Social change is sometimes intentional but often unplanned* – walaupun proyek secara sadar misalnya memprediksikan akan adanya perubahan sosial tertentu, namun tidak jarang proyek juga bisa memunculkan perubahan yang “unintentional”.
3. *Social change often generates controversy* (punya konsekuensi “baik” dan “buruk”) – dengan demikian, Proyek harusnya mengidentifikasi secara matang hal-hal yang baik dan buruk tersebut, dan pada langkah-langkah penyiapannya perlu dengan sadar mengikis hal-hal buruk tersebut sampai tingkat minimal;
4. *Some changes matter more than others do* – dalam kaitannya dengan proyek, yang seringkali terdiri dari pelbagai kegiatan, aspek tertentu bisa saja memunculkan perubahan yang lebih menonjol dibanding aspek lainnya. Dan hal-hal semacam ini memang perlu diberi perhatian.

Melalui pembangunan, masyarakat didorong dan diarahkan untuk menuju ke keadaan dan kondisi yang lebih baik dan sejahtera. Dan ciri-ciri modernisasi yang patut diwaspadai adalah :

1. hilangnya masyarakat adat atau tradisional,
2. ekspansi dari pilihan individual,
3. bertambahnya *social diversity*, dan
4. *future orientation and growing awareness of time* (Macionis, 1996).

Terjadinya sebuah perubahan tidak selalu berjalan dengan lancar, meskipun perubahan tersebut diharapkan dan direncanakan. Terdapat faktor yang mendorong

sehingga mendukung perubahan, tetapi juga ada faktor penghambat sehingga perubahan tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Faktor pendorong perubahan

1. Terjadinya kontak dengan kebudayaan lain
2. Sistem pendidikan formal yang maju
3. Sikap menghargai hasil karya orang dan keinginan untuk maju.
4. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang.
5. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat.
6. Penduduk yang heterogen.
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang tertentu
8. Orientasi ke masa depan
9. Nilai bahwa manusia harus selalu berusaha untuk perbaikan hidup.

Faktor penghambat perubahan

Banyak faktor yang menghambat sebuah proses perubahan. Menurut Soekanto (1982), ada delapan faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial, yaitu:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain.
2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
3. Sikap masyarakat yang mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif.
4. Adanya kepentingan pribadi dan kelompok yang sudah tertanam kuat (*vested interest*).
5. Rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan dan menimbulkan perubahan pada aspek-aspek tertentu dalam masyarakat.
6. Prasangka terhadap hal-hal baru atau asing, terutama yang berasal dari Barat.
7. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis.
8. Adat dan kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah.

Sistem sosial merupakan kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem social ini terdiri dari aktipitas manusia berinteraksi, berhubunganserta bergaul satu sama lain yang dari detik ke detik, dari hari ke hari dan tahun ketahun selalu mengikuti pola pola tetentu yang berdasarkan adat tata kelakuan.sebagai rangkaian aktipitas manusia dalam suatu masyaakat, maka sisem social itu konkrit,terjadi disekeliling kita sehari hari, bisa diobservasi, diphoto dan didokumentasikan (Koentjaraningrat, 1986).

PROYEK PLTA KOTO PANJANG

Riau merupakan suatu provinsi yang sedang membangun dan memiliki sumber daya alam yang sangat besar. Sumber tersebut mulai diolah dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat, dan dapat dipergunakan untuk menunjang pengembangan sector lainnya, seperti industri, pariwisata dan pertanian. Selama ini kegiatan seperti perkebunan, industri dan pertambangan di Provinsi Riau masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sehingga penyediaan permintaan listrik untuk masyarakat belum sepenuhnya mampu disediakan oleh PLN.

Mengatasi kekurangan daya dan dimungkinkannya sumber listrik dari PLTD, maka pemerintah mengambil kebijakan menjalin kerja sama dengan pemerintah Jepang dan selanjutnya membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Koto Panjang. Pembangunan proyek Koto Panjang ini bertujuan untuk menghasilkan dan mensuplai energi listrik sebesar 49,5 juta kwh / tahun, yang akan mengisi kebutuhan listrik untuk Kota Pekanbaru, Dumai dan Kampar.

Lokasi pemindahan penduduk dengan adanya proyek PLTA, disediakan yaitu:

1. Koto Ranah, yang berasal dari Pulau Gadang sebanyak 592 kk
2. Selatan Muara Takus, yang berasal dari Muara Takus sebanyak 244 kk dan
3. Koto Tua sebanyak 699 kk
4. PIR Bangkinang Blok x / G, yang berasal dari Muara Mahat sebanyak 477 kk
5. Selatan Siberuang, yang berasal dari Gunung Bungsu sebanyak 241 kk
6. Selatan Batu Basurat, yang berasal dari Pasar Batu Basurat sebanyak 700 kk
7. Ranah Sungkai, yang berasal dari Seberang Batu Basurat sebanyak 557 kk
8. Ranah Koto Talago, yang berasal dari Tanjung Alai sebanyak 313 kk.

Sedangkan untuk batu basurat yang lainnya ditempatkan pada daerah Rimbo Datar Sumatera Barat. Di lokasi pemindahan masing masing penduduk mendapat luas lahan yang sama, yaitu 0,1 ha untuk lahan pekarangan, lahan pemukiman seluas 0,5 ha serta lahan pangan seluas 0,39 ha dan lahan plasma seluas 2 ha. Tanah yang ada dilahan pekarangan hanya sebahagian saja yang diolah atau diusahakan terutama ditanami dengan ubi kayu, sedangkan lahan pangan hanya sebahagian ditanami dengan tanaman pisang dan jagung.

Akibat pemindahan penduduk dari lokasi lama ke lokasi baru akan menimbulkan berbagai macam perubahan didalam lingkungan masyarakat tersebut sehingga bagi penduduk yang dipindahkan harus mengadakan penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru. Dalam melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan, secara tidak langsung terjadi perubahan tingkat sosial dan ekonomi masyarakat serta budayanya.

PERUBAHAN SOSIAL PADA MASYARAKAT PLTA KOTO PANJANG

Pembangunan PLTA Koto Panjang menimbulkan perubahan sosial pada masyarakat yang dipindahkan ke daerah lain, perubahan sosial yang terjadi antara lain adalah:

Aspek pendidikan

Pengaruh pembangunan PLTA koto panjang terhadap pendidikan. Cukup positif, karena disadari bahwa pendidikan masyarakat pedesaan masih sangat rendah. Maka pemerintah dan pelaksana proyek, menyiapkan fasilitas pendidikan seperti dibangun sarana pendidikan yaitu rumah sekolah dan kelengkapan lainnya. Dengan adanya fasilitas pendidikan ini diharapkan anak usia sekolah dapat bersekolah sebagai mana mestinya. Sarana dan prasarana pendidikan di daerah baru ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan daerah lama yang ditenggelamkan oleh proyek PLTA.

Aspek Kesehatan

Selanjutnya terhadap kesehatan diketahui bahwa pembangunan PLTA koto panjang juga berpengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat, hal ini dikarenakan telah

dibangun pula sarana kesehatan seperti puskesmas dan dengan tersedianya tenaga medis sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk berobat.

Perubahan Terhadap Adat Istiadat

Secara umum tidak terjadi perubahan adat istiadat pada masyarakat yang dipindahkan dengan dilaksanakan pembangunan PLTA Koto Panjang. Perubahan yang terjadi adalah pada salah satu fungsi mamak (pucuk adat). Perubahan ini terjadi karena mamak (pucuk adat) di daerah sebelum masyarakat ini dipindahkan menguasai tanah ulayat. Tanah ulayat terdiri dari hutan basah (rawa) dan hutan kariang (hutan kering). Setelah dipindahkan ke daerah baru mamak atau pucuk adat tidak mempunyai tanah ulayat lagi.

Fungsi mamak atau pucuk adat dalam hal ini dapat diketahui. Yaitu bila ada kemenakan (anak dari adik atau kakak perempuan/saudara satu suku/marga) dengan suku/marga yang sama dengan mamak yang bersal dari desa setempat mengangur dan menghadap kepada mamak, biasanya mamak (pucuk adat) menanyakan. Keahlian kemenakan tersebut bisa kesawah atau berkebun. Kalau seandainya kemenakan bisa kesawah maka akan dipinjamkan sebidang tanah (hutan basah/rawa) kepada kemenakan dan sifatnya pinjaman bukan hak milik. Bila pada suatu saat tanah tidak diusahakan lagi oleh sang kemenakan hak tanah kembali ke mamak. . Perubahan yang terjadi sifatnya negative karena hal ini dapat mencegah pengangguran dan kemiskinan.

Perubahan lingkungan Sosial dalam Pertanian

Pemindahan atau transmigrasi penduduk kelokasi pemukiman baru tentunya akan menimbulkan berbagai perubahan dalam pola kehidupan masyarakat yang sewaktu di daerah asalnya sudah mengusahakan usaha tani yang sudah turun temurun dan sudah merupakan penghasilan bagi keluarga tani tersebut, dan sampainya di daerah pemukiman yang baru mereka harus memulainya lagi dari awal.

Selain itu masyarakat ketika masih di daerah asalnya mengusahakan tanaman pangan berupa padi sawah dan palawijaya serta tanaman lainnya seperti karet dan kelapa yang system pengambilan keputusan sepenuhnya berada ditangan petani itu sendiri, setelah mereka harus melaksanakan usaha tanaman industri sawit yang sistem pengambilan keputusan sepenuhnya sudah tidak berada ditangan petani. Dan berlaku mekanisme pasar serta komersialisasi terhadap produk yang dihasilkan.

Sungguh pun begitu, menurut Scott (1983) proses pertumbuhan pertanian komersial tersebut malah kian menjepit posisi petani dari beberapa cara, seperti: (i) kaum tani menjadi tidak terlindungi dari ketidakpastian baru yang disebabkan oleh ekonomi pasar yang memperbesar variasi penghasilannya; (ii) terjadinya erosi nilai-nilai yang hidup di desa dan kekerabatan sebagai pemberi perlindungan dan pemikul risiko secara bersama-sama; (iii) berbagai "katub pengaman" subsistensi tradisional atau pekerjaan tambahan untuk menyambung hidup menjadi berkurang atau hilang sama sekali; (iv) pemilik tanah yang sebelumnya memikul sebagian risiko pertanian dapat mengutip lebih banyak lagi dari petani lewat sewa dan memungut bagian penghasilan penggarap; dan (v) negara sering menaikkan penerimaan pajak melalui pungutan dari kegiatan pertanian. Dengan deskripsi tersebut, kondisi penduduk yang tinggal di

wilayah perdesaan justru mengalami kemerosotan daya hidup secara terus-menerus karena tekanan dari dua ujung: kebijakan pemerintah yang semakin bias perkotaan dan tekanan pasar (yang dikuasai oleh pelaku ekonomi di sektor industri/jasa) yang kian deras.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat, 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru, 1986. Jakarta.

Macionis, J.J., 1996. *Society, The Basics*. Third Edition: Prentice Hall, Upper Saddle, New York.

Scott, J. C. 1981. *Moral Ekonomi Petani. Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. LP3ES. Jakarta.

Soekanto, S., 1982. *Memperkenalkan Sosiologi*. R.